

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini organisasi sektor publik dituntut untuk lebih ekonomis, efisien, dan efektif dalam mengelola keuangannya. Dalam Sedarmayanti (2003:2), keuangan sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi keuangan publik yang handal dan relevan sebagai alat untuk pengambilan keputusan membutuhkan pelaksanaan akuntabilitas publik, pengendalian manajemen keuangan dan akuntabilitas. Hal tersebut dilakukan sebagai untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Di mana secara umum dalam prinsip *good governance* mempunyai prinsip yang secara jelas bahwa dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang tercantum dalam perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara.

Adanya akuntabilitas yang baik merupakan bukti terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakan dalam menciptakan pemerintahan yang baik dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang didefinisikan oleh beberapa ahli yang dikutip oleh Abdulrahman (1997) dalam Otonomia mengungkapkan bahwa:

- F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah).
- Ateng Syarifuddin, mengatakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan (tidak terikat atau tergantung kepada orang lain atau pihak tertentu). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
- Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat.

Kegiatan otonomi daerah yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran, serta lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Mengenai kegiatan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. Dalam hal ini otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola

manajemen keuangan dengan dengan baik, serta memberikan informasi transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik.

Dapat dikatan bahwa otonomi daerah meuntut kemandirian dalam mengelola sistem manajemen keuangan di daerah dimana distribusi kewenangan atau kekuasaan disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan pengelolaan keuangan. Berguna untuk pengambilan keputusan dalam hal ekonomi, sosial, politik maka diperlukannya sistem informasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Informasi dalam hal keuangan publik yang diperlukan haruslah dapat dipertanggungjawabkan serta informasi yang diberikan harus akurat, relevan, tepat, dan andal.

Menurut (Rahadi, 2007:10), Pentingnya informasi yang akurat dan tepat waktu dalam keputusan menyebabkan banyak organisasi membutuhkan adanya sistem informasi yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa organisasi pemerintah maupun swasta yang sekarang ini mengubah sistem informasinya dari manual menjadi sistem informasi berbasis teknologi. Penerapan teknologi informasi tidak hanya pada sektor swasta tetapi juga sektor publik, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Serta pendapat dari (Siregar, 2008:7), menjelaskan sistem informasi berbasis teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Sistem informasi berbasis teknologi mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi, memudahkan komunikasi, memperkenalkan pelayanan

baru, dan mendorong kreatifitas serta inovasi dalam manajemen pemerintahan. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang lebih ekonomis, efektif, dan efisien serta memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik dan transparansi kepada masyarakat.

E-government di Indonesia mendapat ketertarikan oleh pemerintah mulai sejak tahun 2003, tepatnya pada saat munculnya Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mempercepat proses demokrasi. Sedangkan menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan informasi teknologi dalam proses pelaksanaannya membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan informasi teknologi untuk proses terintegrasi. Dimana bertujuan menciptakan informasi yang dapat menunjukkan transparansi dan pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan.

E-government dalam penerapan pemerintahan daerah sendiri melaksanakan kegiatan komputerisasi yang berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menata tata kelola keungan publik. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pemerintah daerah dan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang dilaksanakan. Dalam upaya membantu pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban yang dapat diandalkan, Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun sistem aplikasi komputer yang dapat dimanfaatkan setiap saat. BPKP dan pemerintah daerah bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Aplikasi komputer SIMDA ini dihasilkan oleh BPKP yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pertanggungjawabannya. SIMDA merupakan aplikasi berbasis komputer yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah secara terkomputerisasi, baik ditingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun ditingkat SKPD. Program aplikasi SIMDA diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi pemerintah daerah terutama dalam penyusunan APBD. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, 2013: 2)

Pada pelaksanaan sekarang ini program aplikasi simda sudah diterapkan di 349 pemerintah daerah dari 524 pemerintah daerah sebanyak 66,6% (BPKP, 2013: 1). Salah satu pemerintah daerah yang sudah menerapkan program aplikasi SIMDA adalah Pemerintah Kota Kediri. Pemerintah daerah Kota Kediri menerapkannya sejak tahun 2010 berdasarkan peraturan walikota Kediri Nomor

31 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pelaksanaan SIMDA sendiri pada pemerintah Kota Kediri sudah diterapkan pada beberapa instansi yang ada, akan tetapi pelaksanaannya masih mencakup satuan kerja yang berada pada lingkup pemerintahan saja yaitu kantor dinas dan bidang-bidang yang berada dikantor walikota dimana belum sampai di pemerintahan kelurahan. Pada kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi keuangan daerah diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem informasi manajemen keuangan daerah diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai. Serta melalui SIMDA keuangan, satuan kerja yang ditugaskan sebagai opertaor pelaksana teknis pemerintah Kota Kediri diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam pengisian dalam pengelolaan keuangan yang digunakan.

Dalam pelaksanaannya SIMDA pemerintah Kota Kediri dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Penganggaran yang dimaksud berupa rencana kerja anggaran (RKA), rancangan penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), penjabaran APBD beserta perubahannya dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Proses penatausahaan meliputi surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya. Sedangkan

untuk kegiatan akuntansi dan pelaporan berupa jurnal, buku besar, laporan keuangan, laporan arus kas, dan perda perda pertanggungjawaban dan penjabarannya.

Disamping itu, SIMDA pada dasarnya dirancang untuk memberikan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pada kegiatan pengelolaan keuangan bagi seluruh satuan kerja pemerintah Kota Kediri. Dimana pengelolaan keuangan pada saat penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan awalnya dikelola masih secara manual, yaitu dengan pencataan, pengarsipan, dan pelaporan keuangan merupakan pengelolaan yang dapat dikatakan dilakukan secara rumit. Hal tersebut dapat dikatakan pengelolaan keuangan yang masih menyita waktu dan tenaga manusia dan berlebih serta dana yang dikeluarkan juga cukup banyak. Pihak satuan kerja perangkat daerah harus mencatat dan melakukan pengisian laporan keuangan serta pengarsipan penatausahaan secara manual dengan cara menulis penggunaan anggaran yang dilaksanakan, apabila terjadi kesalahan pengecekaanya juga terasa menyulitkan.

Salah satu penerapan SIMDA keuangan yang ada pada SKPD dalam pemerintahan kota Kediri yaitu pada kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri. Sebagai instansi yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan yang dalam penerapannya harus menjunjung transparansi dan pertanggungjawaban yang baik, sebagai wujud dari penerapan *E-government* dalam hal ini SIMDA dan dari Undang-Undang yang menyangkut pokok-pokok kegiatan pengelolaan keuangan publik. Namun dalam pelaksanaan program-program kegiatan pengelolaan keuangan di lapangan memungkinkan

akan di dapati adanya kelemahan atau hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan SIMDA keuangan. Dimana SIMDA Keuangan sendiri suatu sistem berbasis teknologi informasi yang mengandalkan jaringan internet yang terkadang mengalami gangguan, serta SIMDA juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal, dikarenakan SIMDA dioperasikan oleh satuan kerja sebagai operator yang harus memiliki kemampuan teknologi yang baik.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas , penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas administrasi, maka penulis melakukan analisis dan penelitian untuk membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Pemerintahan Kota Kediri (Studi Penelitian Pada Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang penulis akan coba bahas dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri?
2. Bagaimanakah akuntabilitas keuangan di pemerintahan Kota Kediri?

3. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun yang menjadi tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan di pemerintahan Kota Kediri.
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai penerima langsung bentuk layanan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang melalui implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri.

- b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam program implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan Kota Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan kerja agar efektif, efisien, dan ekonomis, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- b. Sebagai bekal dalam upaya memadukan antara teori dan praktek untuk bahan implementasi atau perbandingan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang di paparkan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasan secara singkat sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik dari sisi akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

II. Tintauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dan berhubungan dengan judul. Berisikan pernyataan ataupun penjelasan dari pakar terkait dengan akuntabilitas publik khususnya akuntabilitas administrasi serta tentang implementasi sistem manajemen keuangan daerah berbasis informasi teknologi (SIMDA keuangan).

III. Metode Penelitian

Pada bab ini di dalamnya memuat tentang jenis penelitian, fokus, pemilihan lokasi yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian yang kemudian di akhiri dengan metode analisis.

IV. Pembahasan

Pada bab ini hasil penelitian dan bahasan dari hasil penelitian dimana di jelaskan tentang gambaran umum instansi yang menjadi obyek peneletian kemudian dilanjutkan dengan penyajian data meliputi tentang penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas administrasi di pemerintahan Kota Kediri, dan diakhiri dengan analisis dan pembahasan.

V. Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-ban yang ada dan dari data yang disajikan berisikan saran-saran atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.